

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus perwalian anak di bawah umur yang melibatkan penjualan harta, khususnya merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

Pertama, prosedur pengajuan permohonan perwalian untuk izin menjual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Labuhanbatu sudah mengikuti tahapan hukum acara perdata yang berlaku. Proses ini mengharuskan pemohon, dalam hal ini orang tua, untuk secara cermat memenuhi syarat-syarat administratif dan substansial, termasuk membuktikan urgensi dan kebermanfaatan penjualan aset tersebut demi kepentingan terbaik anak.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak di bawah umur sangat berpusat pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hakim akan menelaah secara mendalam alasan di balik permohonan, kondisi aktual anak, serta potensi dampak dari penjualan harta tersebut terhadap masa depan anak. Keputusan hakim dibentuk berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan keyakinan hakim bahwa tindakan penjualan harta memang diperlukan dan akan memberikan manfaat positif yang signifikan bagi anak.

Ketiga, tanggung jawab hukum orang tua sebagai wali dalam menjaga dan mengelola harta anak di bawah umur sangat besar dan diatur secara ketat oleh sistem hukum Indonesia. Wali wajib bertindak dengan itikad baik, transparan, dan semata-mata demi kepentingan anak. Setiap tindakan hukum terkait harta anak, termasuk penjualan, wajib mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap aset anak dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap kepentingan anak di bawah umur dalam perkara waris dan perwalian, dengan undang-undang yang merinci hak-hak anak, kewajiban wali, dan peran pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan perwalian.

Terakhir, dalam praktiknya, hakim sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan saat menangani perkara perwalian dan penjualan harta anak di bawah umur. Kendala ini bisa berupa keterbatasan bukti yang relevan, kesulitan dalam memastikan transparansi pengelolaan harta oleh wali, hingga tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum yang kompleks pada kasus-kasus yang spesifik.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur:

1. Peningkatan Edukasi Hukum bagi Masyarakat: Penting untuk secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, khususnya orang tua dan calon wali, mengenai prosedur hukum dan implikasi dari pengajuan permohonan

perwalian serta izin penjualan harta anak di bawah umur. Pemahaman yang lebih baik akan membantu mereka mempersiapkan diri dengan benar dan mengurangi potensi kesalahan prosedur.

2. Penguatan Peran Pengadilan sebagai Pelindung: Pengadilan diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga pelindung utama kepentingan anak. Ini dapat dicapai dengan melakukan analisis yang lebih tajam terhadap setiap permohonan, memastikan bahwa setiap putusan selalu berlandaskan pada kepentingan terbaik anak, dan secara proaktif mengawasi pelaksanaan tugas-tugas perwalian.
3. Pengembangan Mekanisme Pengawasan Wali yang Lebih Efektif: Perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan sistematis terhadap pengelolaan harta anak oleh wali setelah izin penjualan diberikan. Ini bisa berupa kewajiban laporan keuangan berkala kepada pengadilan, atau bahkan kemungkinan audit independen, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau aset anak.
4. Peningkatan Kapasitas Profesional Hakim: Untuk menghadapi kompleksitas perkara ini, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim yang menangani perkara perwalian dan penjualan harta anak di bawah umur menjadi krusial. Pelatihan ini dapat mencakup studi kasus, pembaruan regulasi terkait hak anak, serta teknik investigasi untuk menggali informasi yang relevan dari semua pihak.
5. Evaluasi dan Harmonisasi Regulasi: Meskipun kerangka hukum sudah ada, penting untuk secara berkala mengevaluasi dan mengharmonisasi peraturan

perundang-undangan terkait perwalian dan harta anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat merugikan kepentingan anak dan bahwa sistem perlindungan hukum anak tetap relevan dengan perkembangan zaman.